

PENULISAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 62/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA SBY TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT BARATA INDONESIA



Diajukan oleh:

Charl Lewis Jogi Tambunan

NPM : 180513271

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2022

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 62/PDT.SUS-PKPU/2021/PN
NIAGA SBY TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG PT BARATA INDONESIA



Diajukan oleh:
Charl Lewis Jogi Tambunan

NPM : 180513271

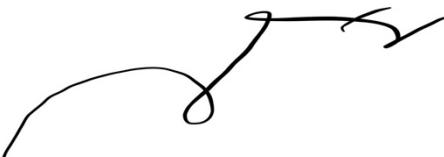
Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

29 Juni 2022

Dosen Pembimbing I,


Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 62/PDT.SUS-PKPU/2021/PN
NIAGA SBY TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG PT BARATA INDONESIA



Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Hadapan Tim Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Univeritas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Juli 2022
Tempat : Fakultas Hukum

Susunan Tim Pengaji

Ketua : Prof. Dr. Dra. Mg. Th. Anita Christiani,
S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

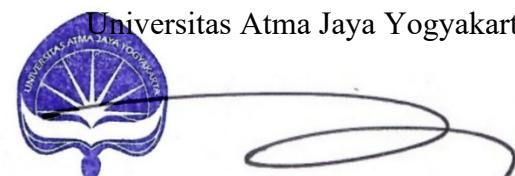
Anggota : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H.,
M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Drs. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

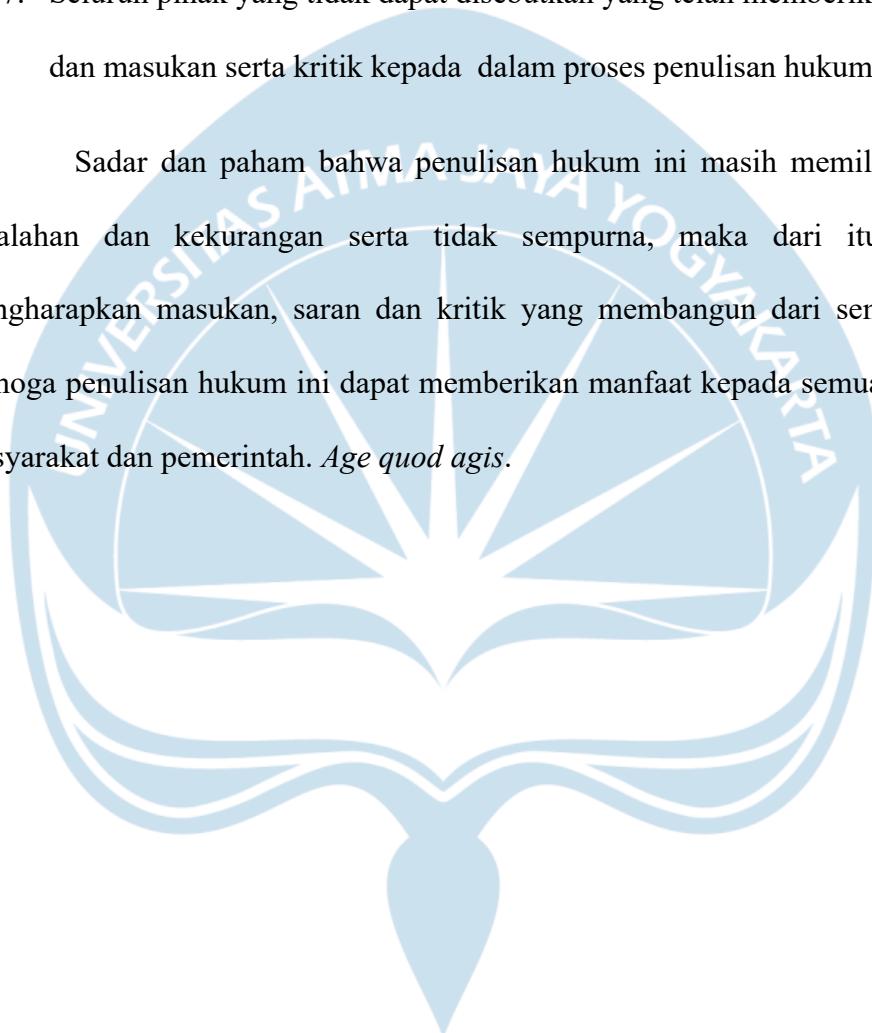
KATA PENGANTAR

Ucapan syukur di haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pertolongan-Nya dapat mengerjakan dan menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 62/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA SBY TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT BARATA INDONESIA”, sebagai syarat untuk memperoleh kelulusan dan gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terimakasih kepada seluruh pihak yang turut serta membantu dan mendukung dalam pembuatan penulisan hukum ini, ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Ir. Yoyong Afriadi, M. Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.,Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan jajaran.
3. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing sekaligus pengajar yang telah mendampingi dalam proses prekuliahian serta penulisan hukum ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universita Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan kesempatan.
5. Papi, Mami, dan adik-adik yang selalu mendukung dan mendoakan dalam menjalani perkuliahan dan mendukung dalam penulisan hukum ini.

6. Teman-teman yang membantu dalam bidang akademik maupun dalam keseharian, terkhususnya kepada mika, rabin dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah memberikan bantuan dan masukan serta kritik kepada dalam proses penulisan hukum ini.

Sadar dan paham bahwa penulisan hukum ini masih memiliki banyak kesalahan dan kekurangan serta tidak sempurna, maka dari itu sangat mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada semua golongan masyarakat dan pemerintah. *Age quod agis.*



ABSTRACT

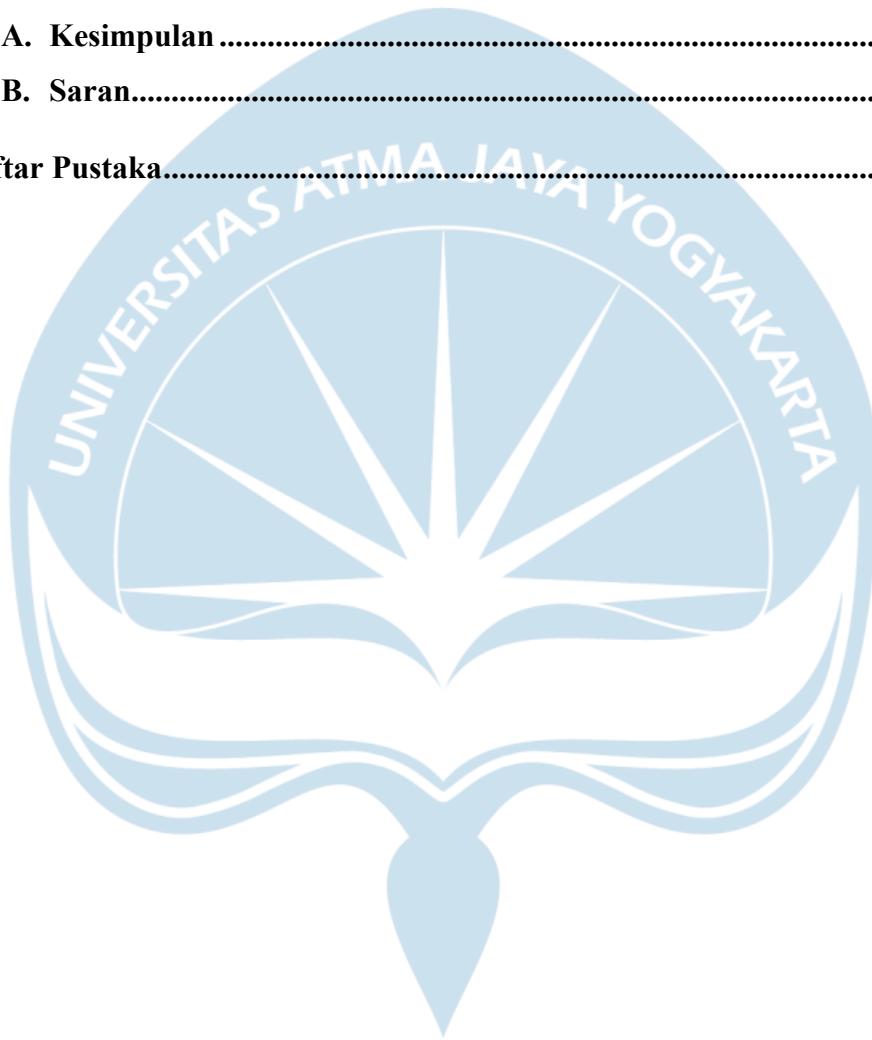
In carrying out activities that generate state profits in the form of State-Owned Enterprises (BUMN), where SOEs are present with capital provided by the state and are state assets, as well as other companies that have debts to other parties, SOEs also have debts to other parties which, if not being paid can be declared bankrupt or by Postponement of Obligation for Payment of Debt, the regulation regarding bankruptcy and postponement of debt payment is regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delay of Payment of Debt. PT Barata Indonesia was declared PKPU in the judge's decision to grant the PKPU request by its creditors. but whether the decision is in accordance with Article 223 . The method used in this study is a normative legal research method. The results show that the State-Owned Enterprise in this case is PT Barata Indonesia which was declared PKPU by the court in accordance with the provisions contained in the Bankruptcy Law and PKPU, but disharmony with other regulations makes the settlement of BUMN PKPU difficult and there is also legal protection.

Keywords: Bankrupt, Postponement of Debt Payment Obligations, State-Owned Enterprises.

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Abstract.....	v
Daftar Isi	vi
Pernyataan Keaslian	
.....	viii
Bab I: Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian.....	16
 Bab II : Pembahasan.....	 20
A. Tinjauan Kepailitan Dan Pkpu.....	20
1. Pengaturan Dan Pengertian Kepailitan.....	20
2. Pengaturan Dan Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	22
3. Syarat Pengajuan Kepailitan Dan PKPU	23
B. Tinjauan Badan Usaha Milik Negara	30
1. Dasar Pihak Yang Dapat Mengajukan Kepailitan Dan PKPU Jika Debiturnya Badan Usaha Milik Negara.....	30
2. Pengaturan Dan Pengertian Badan Usaha Milik Negara	32
C. Analisis Putusan Nomor 62/Pdt-Sus-PKPU/2021/Pn Niaga Sby	37

1. Kasus Posisi.....	37
2. Faktor Yuridis Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Menggunakan Ketentuan Pasal 223	39
Bab III : Penutup	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
Daftar Pustaka.....	53



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli , bukan merupakan plagiasi maupun duplikasi dari penulisan lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan plagiasi dari lain, maka bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Juni 2022

Charl Lewis Jogi Tambunan

